



## PENGARUH PARTAI POLITIK TERHADAP KONSTRUKSI PEMIKIRAN M. NATSIR

Hafnita Sari Dewi Lubis\* & Muhammad Ihsan Syahaf Nasution

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the role of M. Natsir in Indonesian politics. In addition, to find out the role of political parties in Natsir's thinking and the impact of political parties in M. Natsir's political thought. The method used is the historical method. This method is used because to explore past data to find data that is free from prejudice, it must go through a critical analytical process and objectivity can be maintained. With this method, it can be found that Natsir's many efforts in formulating Islam as the basis of the state and his efforts to obtain justice in the development of a region. This was done of course because of the support from various groups, both civilian, military, and political parties such as the Masyumi Party and the Indonesian Socialist Party.*

### ARTICLE HISTORY

Submitted 03 January 2022  
Revised 10 January 2022  
Accepted 02 February 2022  
Published 28 February 2022

### KEYWORDS

M. Natsir; political parties; Indonesian intellectual.

### CITATION (APA 6<sup>th</sup> Edition)

Lubis, H.S.D, & Nasution, M.I.S. (2022). Pengaruh Partai Politik terhadap Konstruksi Pemikiran M. Natsir. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. 6(1), 45-52.

### \*CORRESPONDANCE AUTHOR

[hafnitasari@unimed.ac.id](mailto:hafnitasari@unimed.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5027>

## PENDAHULUAN

Pemikiran politik Islam, terdapat beberapa tipologi terkait hubungan agama dan negara menurut Din Syamsuddin, di antaranya tipologi integralistik, yaitu baik agama dan agama, keduanya berjalan integral; tipologi dinamis-dialektis, yaitu keduanya berjalan simbiotik; dan yang terakhir adalah tipologi integralistik, yaitu baik agama dan negara, keduanya menyatu. Agama dan politik termasuk ke ranah atau wilayah agama. Negara merupakan sebuah lembaga yang menangani masalah politik dan keagamaan. Sehingga seorang kepala negara memiliki kuasa terhadap bidang politik dan keagamaan. Hal ini dikarenakan pemerintahannya diselenggarakan berdasarkan kedaulatan illahi, karena meyakini bahwasanya kedaulatan suatu negara berada di tangan Tuhan.

Menurut Abdurrahman Wahid, terdapat tiga responsi antara Islam dan agama. Ketiganya yaitu integratif, fakultatif, dan konfrontatif. Respons integratif yaitu Islam tidak menghilangkan kedudukannya dan memisahkan antara urusan agama dan kenegaraan. Responsi fakultatif, yaitu sebuah kelompok yang mayoritas dengan membuat aturan per undang-undangan sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan terhadap kelompok minoritas. Bahkan kelompok ini juga harus menerima pendapat dari kelompok lain, walaupun posisinya yang cukup besar di parlemen, dan responsi konfrontatif, yaitu sebuah golongan yang tidak menerima keputusan apa pun jika keputusan itu tidak bersifat Islami (Wahid, 1999, p. 70).

Peran agama dalam kehidupan sangat penting perannya, sehingga para tokoh generasi awal kemerdekaan terus memikirkan peran yang sesuai agama dalam negara yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa. Seperti halnya tokoh M. Natsir, ia cenderung meletakkan kata yang bersifat agama di belakang negara. ia mengatakan bahwa, nasionalisme Indonesia seharusnya bersifat bangsa muslim. Pandangannya tersebut mengenai Islam sebagai dasar negara dan Islam sebagai ideologinya. Pandangan Natsir berangkat dari pemahamannya tentang agama, seperti halnya ia mengutip dalam buku rujukannya yaitu, Montgomery Watt, bahwa "*Islam is more than a religion, it is a complete civilization*" (Shaleh & Wisnaeni, 2019, p. 239).

Pendapat Natsir mengenai agama bahwa, Islam adalah sumber pertentangan terhadap segala bentuk penjajahan, baik eksploitasi sesama manusia maupun memberantas kebodohan. Hal ini dikarenakan Islam tidak memisahkan antara agama dan negara. karena suatu negara membutuhkan agama. sehingga Natsir menganggap bahwa sistem bernegara tidak harus sama dengan sistem kenegaraan pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin. Baginya, Islam harus menjadi pandangan dalam setiap sistem kenegaraan. Natsir juga mengutip pandangan salah satu tokoh, yaitu Iqbal yang menyatakan bahwa pada hakikatnya Islam adalah tauhid. Iqbal menegaskan bahwa inti dari tauhid adalah *working idea*. *Working idea* adalah *equality*, *solidarity*, dan *freedom* (Natsir, 1957, p. 106). Hal ini dikarenakan inti sari tauhid dapat melandasi kehidupan bernegara.

Islam sepakat bahwa, sumber utama ajaran Islam adalah al-Qur'an yang terdapat inti sari ajarannya yaitu akidah dan syariah. Keduanya harus ada satu sama lain, karena memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. adanya akidah yang dapat menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Syariah juga menghubungkan antara manusia dengan Tuhan melalui ibadah, karena hubungan sesama manusia disebut muamalah, sedangkan *siyasah* adalah hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah. Sehingga baik politik dan agama hubungannya tidak dipisahkan satu sama lain. Keduanya harus ada dalam satu kesatuan. Bahkan Imam Syafii menyatakan bahwa tidak ada politik kecuali bersendikan *syara'* (undang-undang Islam) (Karim, 1999, p. 4).

Definisi negara menurut Natsir adalah sebuah institusi atau lembaga yang memiliki tugas dan hak. Sehingga, setiap institusi adalah sebuah badan yang bertujuan yang dapat mencukupi dan memberikan keamanan terhadap warganya. Sebuah institusi juga harus diakui oleh rakyat/masyarakatnya dan memiliki fasilitas yang dapat menopang kebutuhannya dalam melaksanakan tujuannya. Setiap institusi juga harus memiliki sebuah aturan, norma, dan nilai-nilai tertentu yang harus dimiliki oleh setiap masyarakatnya. Setiap institusi tentu harus keanggotaan dan memiliki suatu wilayah atau daerah. Karena suatu institusi harus berdaulat terhadap suatu daerah maupun anggotanya, dan suatu institusi juga harus mampu memberikan sanksi terhadap anggotanya apabila ada yang melanggar aturan-aturan dan norma yang telah disepakati bersama (Sukri, 2019, p. 88).

M. Natsir menegaskan bahwa, negara adalah alat. Berdirinya suatu negara bukan sebagai tujuan utama, melainkan hanya sebagai alat yang digunakan untuk menjamin agar aturan-aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan semua perintah Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist tidak ada artinya jika tidak adanya alat yang digunakan untuk menerapkan perintah maupun aturan-aturan tersebut. tujuan utama berdirinya suatu negara adalah untuk menyempurnakan suatu undang-undang yang berlaku di dalam masyarakat, baik urusan dunia maupun akhirat (Ismail, 1999).

Berbagai macam aturan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia dengan sesama makhluk yang berupa kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Agama bukanlah semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan, melainkan semua yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat atau negara sesuai ajaran Islam yang menjadi bagian dari ideologi dan cita-cita kaum muslimin. Aturan-aturan tersebut termaktub dalam al-Qur'an. Sehingga untuk menjaga aturan-aturan tersebut supaya tetap berlaku, maka diperlukan kekuatan negara (Natsir, 1957, p. 11).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah digunakan untuk menggali data tentang perkembangan masa lampau. Metode penelitian sejarah, terdapat berbagai kemungkinan yang membuat sejarawan harus mampu menemukan data yang bebas dari prasangka, fakta harus jelas dan berbeda dari opini, bukti dapat diterima dengan melalui proses analitis-kritis dan dapat dijaga objektivitasnya (Kuntowijoyo, 2013, p. 91). Maka diperlukan metode yang tepat untuk memecahkan sebuah persoalan historis. Tahapan dalam penelitian sejarah adalah dengan cara heuristik, terutama

sumber sekunder karena penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (penulisan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Partai Politik terhadap Konstruksi Pemikiran M. Natsir

Fenomena munculnya partai politik di Indonesia terjadi pada saat setelah Indonesia merdeka. Partai tersebut memiliki fondasi atau asas yang berupa al-Qur'an dan sunah serta Ijtihad para ulama. Sehingga dapat terlihat jelas bahwa tujuan dari munculnya partai politik Islam pada saat itu supaya dapat menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunah. Akan tetapi masih banyak para politisi yang menganggap dirinya termasuk ke dalam partai Islam, akan tetapi tidak menjadikan kehadirannya di politik sebagai teladan dalam bernegara (Natsir, [2004](#), p. 55).

Masa keemasan Partai Masyumi tidak pernah lepas dari sosok para tokohnya, salah satunya adalah M Natsir. Ia dikenal sebagai seorang tokoh modernis Islam yang membawa Masyumi mencapai era keemasannya. Natsir lahir pada 17 Juli 1908 Solok, Sumatera Barat. Ia pernah mengenyam pendidikan pada masa kolonial dari MULO hingga AMS. Ia juga pernah mengenyam pendidikan agama di lingkungan keluarganya karena ia terlahir di lingkungan religius. Ketika dewasa, Natsir dikenal sebagai seorang ulama karismatik yang berpikiran modern. Sehingga pada akhirnya bersama-sama dengan Wachid Hasyim, Kartosoewijo dan lain-lain mendirikan sebuah partai yang berbasiskan Islam, yaitu Partai Masyumi pada tahun 1945. Munculnya Masyumi di kancah perpolitikan Indonesia untuk menghadirkan semangat Islam dan sebagai kendaraan untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial. Natsir dianggap sebagai tokoh yang tepat yang dapat membawa keemasan bagi Masyumi, sehingga pada tahun 1949 Natsir diangkat menjadi ketua Masyumi setelah menggantikan Soekiman.

Merujuk pada buku "M. Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia" karya M. Dzulfikriddin, yang menyatakan bahwa Partai Masyumi di bawah kepemimpinan M. Natsir menjadi sebuah partai yang memiliki suara terbanyak. Hal ini dapat dilihat bahwa, Partai Masyumi pernah memimpin pemerintahan sebanyak 3 kali. Natsir sendiri pada waktu itu menjadi perdana menteri dan diikuti oleh Soekiman dan Boerhanuddin Harahap. Tentu hal ini tidak lepas dari sosok Natsir yang dapat memimpin Masyumi. Natsir dikenal sebagai tokoh intelektual Islam yang mampu memadukan antara nilai-nilai keislaman dalam bingkai demokrasi melalui konsepnya, yaitu demokrasi teistik. Konsep tersebut menekankan pada menjunjung sistem demokrasi, akan tetapi tetap menjunjung nilai-nilai ketuhanan. Natsir juga sangat menentang adanya penjajahan dan bahkan ide komunisme serta para tokoh penggagas ideologi tersebut, sehingga ia tidak segan-segan untuk melakukan perdebatan dengan tokoh komunis dalam beberapa sidang, salah satunya adalah sidang konstituante (News, [2020](#)).

Salah satu partai yang lahir pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Masyumi. Partai yang didirikan pada 1945 tersebut melalui muktamar umat Islam. Partai yang didukung oleh beberapa organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain (Lubis & Nasution, [2021](#)) yang menghantarkan Masyumi berkembang pesat. Sehingga kehadiran Masyumi sangat berpengaruh terhadap perpolitikan di Indonesia dan menjadikan Masyumi sebagai sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia yang berasaskan Islam. Masyumi juga memiliki kader yang sangat berpengaruh di masyarakat. Sehingga semakin banyaknya pengaruhnya di Masyarakat yang menghantarkan Masyumi selalu terlibat dalam urusan perpolitikan di Indonesia. (Muliati, [2015](#), p. 136).

Pengaruh Masyumi dalam memainkan perannya di Indonesia sangat besar. Hal ini terlihat ketika awal kemerdekaan Indonesia, dan masih adanya upaya agresi militer yang dilakukan oleh kolonial yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. sehingga peran Masyumi di sini ialah membendung dan melakukan perlawanan terhadap upaya menguasai kembali Indonesia dengan melakukan perang dan bahkan berdiplomasi dengan kolonial melalui para tokoh Masyumi. Masyumi

juga berperan dalam mengembalikan bentuk negara Indonesia yang federal menjadi negara kesatuan dan berjuang aktif untuk memperjuangkannya melalui Mosi yang dikeluarkan oleh Natsir yang mengganti RIS menjadi NKRI pada 1950. (Siregar, [2008](#), pp. 19–20).

Keberhasilan Natsir berhasil menarik simpati berbagai kalangan, termasuk Soekarno yang pada akhirnya ia ditunjuk Soekarno untuk membentuk sebuah kabinet. Kabinet tersebut ia menjadi Perdana menteri dan dibantu wakilnya Sultan Hamengkubuwono IX dan beberapa menterinya seperti M. Roem, M. Syafruddin Prawiranegara, K.H Wahid Hasyim. Namun kabinet Natsir tidak bertahan lama karena adanya tekanan dari berbagai pihak. Ketidakharmonisan Natsir dengan Soekarno karena adanya perbedaan pendapat dalam menyikapi Irian Barat. Natsir menghendaki melalui jalur diplomasi, sementara Soekarno mendesak agar mengambil tindakan terhadap Belanda melalui pidatonya. Natsir menanggapi pernyataan Soekarno bahwa kabinetlah yang merancang dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini mengakibatkan kabinet Natsir mendukung pendapat Natsir. Sehingga mengakibatkan Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden pada 1950, dan jelas mengakhirinya sebagai perdana menteri (Siregar, [2008](#), p. 23).

Usaha yang dilakukan oleh Natsir dalam memperkenalkan pemikirannya kepada rakyat Indonesia adalah dengan memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia dari cengkeraman kolonial. Kebersamaannya dengan partai Masyumi, ia berusaha untuk menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi negara. Usaha tersebut dengan jelas terlihat ketika sidang konstituante. Natsir pernah dipercaya untuk menjabat peranan penting di pemerintahan, baik legislatif, maupun jabatan dalam politik partai (Iskandar, [2003](#), p. 205), yaitu sebagai menteri penerangan pada tahun 1946-1949, dan sebagai perdana menteri pada 1949-1950. Di lembaga legislatif, ia pernah menjabat sebagai anggota parlemen RI pada tahun 1956-1958 (Anwar, [1995](#), p. 20). Dalam perpolitikan kepartaian ia pernah menjabat sebagai ketua partai Masyumi pada tahun 1949-1958.

Natsir merupakan seorang negarawan yang selalu memperjuangkan negara Indonesia terlepas dari penjajahan, baik penjajahan secara fisik maupun penjajah dalam hal kebodohan. Ia berusaha melepas belenggu kolonial yang bodoh dan bahkan berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Bahkan ketika ia sudah memasuki usia senja perjuangannya tak pernah surut. Ketika bangsa dan negara dalam kediktatoran Ir. Soekarno, beliau lebih memilih menjauhkan diri dari politik dan ikut serta membela hak-hak rakyat yang menuntut keadilan di daerah-daerah dengan turut dalam PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) (Iskandar, [2003](#), pp. 208–209). Munculnya gerakan PRRI di Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan) merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak adil dalam hal pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Pemerataan pembangunan tersebut baik dalam bidang infrastruktur di masyarakat sipil maupun militer. Sehingga militer, masyarakat sipil, para petani, guru membentuk gerakan PRRI di Sumatera yang bertujuan untuk membuat kesepakatan Piagam Banteng yang nantinya akan mereka suarakan pada pemerintah pusat (Anwar, [1995](#), pp. 2–3).

Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol. Ahmad Husein tidak hanya didukung oleh kekuatan militer saja, tetapi juga didukung oleh partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Gerakan Dewan Banteng bukanlah gerakan Islam, sehingga banyak perwira-perwira Kristen seperti Simbolon dan Sumual bergabung dengan gerakan tersebut. Tujuan utama dari gerakan Dewan Banteng ialah untuk merealisasikan Piagam Banteng yang telah disepakati pada 25 November 1956. Selain itu juga, gerakan Dewan Banteng bertujuan untuk menghalau dominasi PKI di pemerintah.

### **Dampak Dukungan Partai terhadap Pemikiran Politik M. Natsir**

Pada masa pergerakan nasional, nama M. Natsir terus menghiasi kemerdekaan Indonesia. ia seorang tokoh yang sering melakukan perdebatan dengan beberapa tokoh lainnya, termasuk Presiden Soekarno. Yang mana antara Soekarno dan Natsir sangat berbeda dalam pandangannya tentang negara. Soekarno merupakan seorang yang Nasionalis, sedangkan Natsir lebih ke religius yang terus

memperjuangkan pemikirannya tentang Islam sebagai ideologi negara melalui Masyumi (Jatim, [2018](#), p. 122).

Kehadiran Natsir di kancah perpolitikan Indonesia sejalan dengan perkembangan politik di Indonesia dalam mencari identitas kesatuan Negara Republik Indonesia, di mana identitas tersebut sudah tergambar bentuk negara Indonesia yaitu nasionalisme oleh para pemimpin nasional. Akan tetapi hal ini menjadi polemik bagi M. Natsir yang menginginkan bentuk negara Indonesia adalah Islam. pada awalnya memang Natsir menerima bentuk nasionalisme yang memang sebagai alat untuk mencapai cita-cita Islam. Bagi kelompok nasionalis, mereka tidak mencampuri urusan yang berhubungan dengan agama, akan tetapi hal ini diserahkan kepada rakyat. Namun bagi Natsir, ia memandang bahwa Islam memiliki keterikatan dengan negara. dan tidak dapat dipisahkan. Karena menurutnya jika berbicara tentang agama dan negara, maka segala sesuatunya meliputi semua kaidah-kaidah muamalah sesuai dengan syariat agama. Agama Islam bukan sebuah keyakinan yang berkaitan dengan manusia dan Tuhan, melainkan sebuah ajaran yang tersajikan dalam sebuah ibadah. Islam bukan sekedar agama, akan tetapi meliputi semua aspek, yaitu Islam yang bersifat holistik (sesuai Alquran dan hadis) (Natsir, [1973](#), pp. 436–437).

Pemikiran Natsir sering bergesekan dengan dengan banyak orang, bahkan berawal dari permasalahan mengenai Islam sebagai suatu negara atau Islam sebagai Ideologi negara. menurutnya bahwa Islam akan selalu mendasari perjuangan M. Natsir dalam membentuk suatu negara yang menurutnya harus dilakukan. Sehingga hal ini menjadi polemik antara Natsir dan Soekarno. Keduanya memiliki pemikiran yang berbeda mengenai negara, Soekarno yang lebih menekankan kepada Nasionalisme, sedangkan Natsir menekankan kepada Islam sebagai ideologi negara (Waluyo, [2009](#), p. 8). Keduanya terus melancarkan pemikirannya dan saling menyindir satu sama lain. Terlihat ketika Soekarno mengeluarkan buku yang berjudul Islam Sontoloyo. Dalam buku tersebut Soekarno menyatakan bahwa pada masa nabi belum terdapat sabun/ alat yang digunakan untuk membersihkan badan dari kotoran. Sehingga nabi tidak bisa memerintahkan pengikutnya untuk memakai sabun ketika mandi. Akan tetapi gagasan Soekarno dibantah oleh Natsir melalui artikel Islam dan Akal Merdeka yang mengkritik pemahaman Islam Soekarno (Soekarno, [2015](#), pp. 176–186). Pemikiran keduanya terhadap Islam memiliki perbedaan yang signifikan. di antara keduanya tidak ada yang mau mengalah dan selalu membenarkan pemikirannya masing-masing. Dan bahkan keduanya menolak terhadap paham keislaman yang dilontarkan oleh masing-masing.

Pembentukan negara menurut Natsir hendaklah dilakukan tanpa adanya sebuah konflik yang dapat menyengsarakan masyarakat. Sehingga usul tersebut dikenal dengan mosi integral, yaitu sebuah mosi yang dikeluarkan oleh Natsir untuk menyatukan Indonesia menjadi negara kesatuan (Noer, [1987](#), p. 279). Keberhasilan tersebut berhasil mengangkat Natsir menjadi seorang perdana menteri (Jatim, [2018](#), p. 128).

Perjuangan menurut Natsir adalah sebuah seni. Di mana memerlukan sebuah keindahan dalam estetikanya. Dalam setiap perjuangan memerlukan pengorbanan dalam mencapai tujuan dan tanpa adanya yang merasa terkalahkan dari pihak lawan. Pandangan tersebut berusaha diterapkan oleh Natsir ketika mosi integralnya berusaha mewujudkan mosi integral yang dirancangnya untuk membubarkan negara yang bersifat federal/ RIS (Abibullah, [1996](#), p. 5). Sehingga pada 1950, negara federal/ RIS berubah menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahannya, yaitu demokrasi parlementer. Berkat mosi integralnya tersebut, Natsir ditunjuk oleh Soekarno menjadi ketua dewan eksekutif Masyumi.

Harapan Natsir terhadap keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang memang dipilih oleh rakyat untuk mewujudkan kehidupan bernegara secara demokratis, sehingga memunculkan piagam perjuangan menyelamatkan negara dengan adanya tuntutan terhadap pemerintah pusat. Jadi maksudnya, rakyat dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut melalui lembaga yang menampung aspirasi rakyat yang menginginkan adanya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Namun, pada

1958, Perdana Menteri Djuanda memberikan penolakan terhadap tuntutan dari masyarakat Padang, dan dilanjutkan dengan pemutusan hubungan dengan Sumatera Utara (Suyitno, [2015](#), p. 240).

Pandangan Natsir tentang holistik tersebut berpandangan bahwa antara politik dan negara sama-sama dalam kerangka keislaman. Pandangan Natsir tentang Islam sebagai kepercayaan yang di dalamnya meliputi kegiatan sosial. Hal ini juga seperti pandangan al-Maududi, M. Rasyid Ridho, Hasan al-Banna, dan Muhammad Qutb. Pemikiran-pemikiran tersebut sangat berpengaruh dalam pemikiran politik M. Natsir. Seperti yang dia tulis dalam *Capita Selecta* bahwa “sesungguhnya Allah memegang kekuasaan penguasa, yang tidak dapat dipelihara dan dipegang oleh Alquran”. Maksud pernyataan Natsir dapat disimpulkan bahwa kepentingan Islam dan negara adalah dengan menegakkan syariat Islam di dalam kehidupan bernegara. Sehingga, aktivitas bernegara baik politik, sosial, ekonomi harus sesuai dengan syariat. Selain itu, Natsir juga menghendaki negara harus berlandaskan agama, yaitu Nasionalisme Islam (Maarif, [1996](#), p. 26).

Pemikiran politik tersebut cenderung pada doktrin sosial politik Islam. Namun, ideology yang dibangun oleh Natsir lebih tepat dikatakan sebagai modernisme politik. Hal ini berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh al-Maududi yang bersifat fundamentalis dalam politik. Namun demikian, baik Natsir maupun al-Maududi berpandangan bahwa Islam merupakan sebuah agama yang *rahmatan lil alamin* dan sekaligus penyempurnaan agama-agama sebelumnya. Kesempurnaan tersebut karena Islam hanya memberikan panduan, bukan dalam bentuk rincian. Ia tidak menafsirkan bahwa ijtihad dilakukan oleh para ulama dan pemikir Islam, namun ijtihad juga merupakan sebuah respons dalam mentransformasikan Islam sesuai dengan konteksnya (Harjono, [1996](#), p. 65).

Pemikiran politik merupakan bagian terpenting dalam perpolitikan di Indonesia. pemikiran politik yang ada di masyarakat merupakan sebuah refleksi masyarakat dalam membentuk suatu sistem perpolitikan yang dianggap tepat untuk diterapkan sebagai cara untuk mengatur pola hidup yang sesuai dengan aturan. Pemikiran tersebut dapat berupa ide, gagasan. Adanya pemikiran politik berusaha untuk membentuk suatu sistem politik yang akan diimplementasikan di suatu negara. jika dikaitkan dengan Indonesia, pertama kali munculnya pemikiran politik ialah pemikiran politik Islam. Munculnya pemikiran politik Islam di Indonesia yang kemudian disusul dengan pemikiran politik lainnya, di antaranya seperti nasionalis sekuler dan komunis (Hassan, [2011](#), p. 60).

Pemikiran politik Islam pada dasarnya menginginkan terbentuknya sebuah suatu negara yang berlandaskan Islam, akan tetapi pemikiran politik Islam masih belum mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Hal ini tentu sangat mengherankan, mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam. Bahkan hingga saat ini, Islam tetap saja berada pada posisi yang termarginalisasi dalam dunia perpolitikan Indonesia yang mendekati sekularisasi. Gejala tersebut jauh sebelum Indonesia terbentuk, seperti halnya nasionalis sekuler dan komunis. Sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertentangan antara Islam dengan aliran-aliran lainnya yang akan menimbulkan polemik antara Islam dan nasionalisme sekuler setelah ditetapkannya komunisme sebagai aliran/ paham terlarang (Brebesy, [1999](#), p. 142).

Puncak dari pemikiran politik Natsir dalam memperjuangkan apa yang dianggapnya terbaik bagi bangsa dan negara dengan menentang seorang presiden melalui karya-karyanya. Ia ikut serta dalam membela hak-hak rakyat dan menuntut keadilan di daerah-daerah dengan turut dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Iskandar, [2003](#), pp. 208–209). Hal ini dilatarbelakangi adanya kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang hanya mementingkan sentralisasi pembangunan. Pemerintah tidak adil dalam pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, baik infrastruktur sipil maupun militer. Sehingga militer, beserta masyarakat sipil membentuk suatu gerakan di Sumatera untuk membuat kesepakatan Piagam Banteng yang nantinya akan mereka suarkan pada pemerintah pusat (Anwar, [1995](#), pp. 2–3).

Perjuangan yang dilakukan oleh M. Natsir tersebut mendapatkan dukungan dari pihak militer, Partai Masyumi, dan Partai Sosialis Indonesia yang justru dapat menarik simpatisan dari masyarakat

dari kalangan militer non-Muslim. Hal ini dikarenakan gerakan tersebut bukanlah gerakan keagamaan, melainkan sebuah gerakan yang menginginkan adanya keadilan dalam pemerataan pembangunan dan merealisasikan Piagam Banteng yang telah disepakati pada 25 November 1956. Selain itu, gerakan tersebut bertujuan untuk menghalau dominasi PKI di pemerintah (Lubis & Nasution, 2021).

Polemik antara pandangan Islam dan nasionalisme muncul antara M. Natsir dengan Soekarno. Yang mana M. Natsir yang mewakili Islam dan Soekarno mewakili nasionalis sekuler. M. Natsir berupaya menentang aliran nasionalis sekuler Soekarno melalui kumpulan tulisan-tulisannya. Melalui beberapa tulisannya seperti “*Persatuan Agama dan Negara*”, Natsir menanggapi pernyataan Soekarno dalam tulisannya artikelnya yaitu “*Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dengan Negara*”. Sehingga perlu diketahui bahwa Natsir memulai perjuangannya dalam pemikirannya untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan bahkan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perpolitikan di Indonesia (Iskandar, 2003, p. 216).

## SIMPULAN

Natsir adalah seorang yang terus memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara. ia juga sekaligus perumus ide tentang Islam sebagai dasar negara. Akan tetapi pemikirannya tersebut mendapatkan pertentangan dengan tokoh lainnya seperti Soekarno. Hal ini tentu dikarenakan adanya dukungan dari kelompok lain terhadap ide-ide Natsir dalam menentang pemerintah. Menurut Natsir, ideologi Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, justru Pancasila sejalan dengan al-Qur’an. Pemikirannya tersebut juga berjasa dalam menyatukan Republik Indonesia Sementara menjadi negara kesatuan dengan mosi integralnya. Pemikiran tersebut tidak lepas dari peran Partai Masyumi dalam pemikiran Natsir, sehingga mampu memberikan kontribusinya dalam menyatukan Indonesia, namun karena ketidakpuasannya terhadap pemerintah, yang mengakibatkan dia terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia untuk mendapatkan keadilan dalam pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah, baik infrastruktur sipil maupun militer.

## REFERENSI

- Abibullah, D. (1996). *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*. Pustaka Firdaus.
- Anwar, M. S. (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Paramadina.
- Brebeshy, M. M. al. (1999). *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais*. Raja Grafindo Persada.
- Harjono, A. (1996). *Pemikiran, Perjuangan Muhammad Natsir*. Pustaka Firdaus.
- Hassan, M. K. (2011). Mohammad Natsir (1908-1993): Satu Model Kecendekiawanan. *GJAT*, 1(1).
- Iqbal, M. (2010). *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Kencana.
- Iskandar, R. K. (2003). POLEMIK DASAR NEGARA ISLAM ANTARA SOEKARNO DAN MOHAMMAD NATSIR. *Mimbar*, 19(2).
- Ismail, F. (1999). *Ideologi : Hegemoni dan Otoritas Agama*. Tiara Wacana.
- Jatim. (2018). Gagasan Kebangsaan Mohammad Natsir dan Kontribusinya dalam Pemikiran Keislaman. *El-Furqania*, 4(2).
- Karim, R. (1999). *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Lubis, H. S. D., & Nasution, M. I. S. (2021). Meninjau Ulang Narasi Besar dalam Buku Sejarah tentang Mohammad Natsir pada Masa Percobaan Demokrasi Indonesia, 1950-1957. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 5(2), 201-207.
- Maarif, A. S. (1996). *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah ketatanegaraan*. LP3ES.
- Muliati, I. (2015). Pandangan M. Natsir Tentang Demokrasi: Kajian Pemikiran Politik Islam. *Tingkap*, XI(2).
- Natsir, M. (1973). *Capita Selecta*. Bulan Bintang.
- Natsir, Mohammad. (1957). Islam sebagai Dasar Negara. *Sidang Pleno Konstituante Pada Tanggal 12 November 1957*.
- Natsir, Mohammad. (2004). *Islam Sebagai Dasar Negara*. Sega Asry Berat.
- News, D. (2020). *Natsir, Tokoh Kharismatik Masyumi Teman Ngopi DN Aidit*. Detik News.

- <https://news.detik.com/berita/d-5255728/natsir-tokoh-kharismatik-masyumi-teman-ngopi-dn-aidit/1>
- Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional*. Pustaka Utama Grafiti.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2).
- Siregar, I. F. (2008). Pasang Surut Peran Politik Masyumi dalam Pemerintahan (1945-1960). *Forum Ilmu Sosial*, 35(1).
- Soekarno. (2015). *Islam Sontoloyo*. Segi Arsy.
- Sukri, M. A. (2019). Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Mohammad Natsir. *Al Fuad Journal*, 3(1).
- Suyitno, A. (2015). Konsepsi Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan Dari Perspektif Pemikiran Politik Islam. *Intizar*, 21(2).
- Wahid, A. (1999). *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Grasindo.
- Waluyo. (2009). *Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional*. Ombak.